



Buletin Parlementaria

Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022



Jelang G20, Persiapan Prokes di Bandara Labuan Bajo Berjalan Baik



4 Rachmat Gobel:
Sarjana Baru adalah
Cahaya Baru bagi
Indonesia



5 Gus Muhaimin Minta
Pemerintah Lanjutkan
Intervensi Harga
Minyak Goreng



9 772614 339005

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan persiapan protokol kesehatan (prokes) delegasi di bandara dalam menghadapi pertemuan G20 dan *event* internasional lain di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, relatif berjalan dengan baik dan terus menerus meningkatkan perbaikan. Untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai hasil rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak agar pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dalam rangka G20 dilaksanakan dengan baik di Labuan Bajo.

“Kami melihat mulai dari aspek prosedur, alat yang dipakai, SDM, dan bagaimana kerja sama dan sinergitas yang dilakukan oleh Kepala Bandar Udara Labuan Bajo, KKP, pemda, pihak rumah sakit, dan para pemangku kepentingan lainnya sudah berjalan dengan baik. Hasil dari pertemuan ini selanjutnya akan menjadi catatan untuk diberikan ke berbagai pihak untuk memastikan bahwa persiapan protokol kesehatan dalam rangka menerima tamu asing dalam persiapan G20 ataupun acara internasional lain berjalan baik,” ungkap Melki usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (27/1).

Di samping itu, dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan mitra kerja terkait, terungkap satu usulan, yakni perlu dibangunnya fasilitas kesehatan di beberapa destinasi wisata maupun di tempat yang akan menjadi tempat pelaksanaan G20 nanti. Menanggapi hal ini, politisi Partai Golkar itu mendukung usulan tersebut, untuk nantinya akan diputuskan bersama dengan Kementerian Kesehatan.

“Kami sudah mendengarkan dengan baik (berbagai usulan). Akan kami segera *follow up* untuk jadi keputusan bersama Komisi IX dan Kementerian Kesehatan di dalam rangka membantu persiapan dari aspek fasilitas kesehatan, fisiknya, alat kesehatan, dan juga SDM. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu

Jelang G20, Persiapan Prokes di Bandara Labuan Bajo Berjalan Baik



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI meninjau Bandara Labuan Bajo. Foto: Tiara/nvl

penerapan terlaksananya pelayanan kesehatan, dan ini akan menjadi atensi kami dengan Kementerian Kesehatan,” jelas Melki.

Sementara dalam hal pendistribusian vaksin di Labuan Bajo, sampai saat ini berdasarkan laporan yang sudah disampaikan, vaksinasi tahap pertama di Labuan Bajo mencapai kurang lebih 90 persen dan vaksinasi tahap dua sebesar 60 persen. Anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) NTT II itu menilai komunikasi yang dilakukan pemda maupun Dirjen P2P Kemenkes, di dalam rangka persiapan G20 telah berjalan dengan baik, di mana capaian vaksinasi menjadi salah satu pemenuhan parameter kesehatan.

“Tentunya dalam rangka G20 ini, vaksinasi tentu dibutuhkan baik

vaksinasi tahap satu ataupun dua, maupun juga *booster*. Tentu hal ini akan kami dorong agar bisa dilaksanakan secara optimal, sesuai waktu, dan benar-benar menjangkau orang yang membutuhkan khususnya untuk vaksinasi *booster* kali ini,” tutur Melki.

Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menuturkan dalam hal persiapan penerapan protokol kesehatan di bandara, koordinasi terus dilakukan antara pemkab dengan KKP Bandara di Labuan Bajo. “Kebutuhan atau kekurangan tenaga kesehatan, tentu pemda dalam hal ini *men-support* dan kita sering melakukan koordinasi selain dalam hal protokol kesehatan, juga dalam hal dokumen-dokumen yang diperlukan,” ujarnya. ■ tra/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/rvl

Puan Maharani Minta Evaluasi PTM Akomodasi Seluruh Kepentingan Siswa

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta agar evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dilakukan dengan mempertimbangkan sebanyak-banyaknya indikator. Dengan begitu, seluruh kebutuhan dan kepentingan siswa dapat terakomodir. Apalagi selama 2 tahun pandemi Covid-19, anak-anak merasa bosan akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Sebagai orang tua, saya cukup senang anak-anak kita sudah bisa belajar dan berinteraksi bersama teman sebayanya di sekolah. Namun, kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia membuat khawatir orang tua murid terhadap kondisi anaknya karena sekolah telah menjadi klaster penyebaran Covid-19,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya kepada *Parlementaria*, Rabu (2/2).

Lebih lanjut, Puan berharap agar evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan sekolah tatap muka 100 persen, memprioritaskan aspek kesehatan anak. Meski begitu, kebutuhan anak

dari sisi kognitif juga diminta menjadi indikator pertimbangan. “Karena saya banyak menerima aduan dari guru-guru, bahwa dampak PJJ memang terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level PPKM daerah masing-masing,” ujar mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Untuk itu, pemerintah diharapkan melibatkan banyak *stakeholder* dalam melakukan evaluasi PTM. Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, keterlibatan banyak pihak dapat membantu Pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa. “Termasuk dengan melibatkan perwakilan orang tua dan guru. Jadi selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” katanya.

Di sisi lain, Puan juga meminta agar aspek kesehatan dijadikan sebagai indikator terdepan dalam pertimbangan evaluasi PTM. Ia menegaskan, keselamatan anak-anak harus menjadi yang utama. “Hasil evaluasi ini nantinya akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama dalam kondisi peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” tutur Puan lebih lanjut. ■ *bia/sf*



PEGAWAI UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afridhal, Geraldli Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Armanda Prihandini, S. Kom, Larissa Armanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Tahir, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugitto, Ihsan Syahrevi

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Hidayatulloh

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made

Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Rachmat Gobel: Sarjana Baru adalah Cahaya Baru bagi Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, para sarjana baru merupakan harapan dan energi baru bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui kemampuan pikiran dan hatinya, para sarjana baru akan menjadi penggerak perubahan di kalangan masyarakat.

Gobel menyampaikan hal tersebut saat memberikan ceramah umum dalam acara wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (Unma), Pandeglang, Banten, baru-baru ini. "Sarjana baru adalah cahaya baru bagi bangsa. Ia memberikan energi baru melalui kiprahnya sehingga menerangi kehidupan masyarakat," ujar Gobel dalam keterangan persnya, Senin (31/1).

Kepada para Sarjana yang baru diwisuda, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menyampaikan bahwa bangsa dan negara Indonesia sangat membutuhkan kiprah para sarjana baru yang masih segar. Para sarjana, bisa berkiprah di perusahaan atau menjadi wirausaha mandiri.

"Buktikan kemampuannya. Jangan berpuas dengan selebar ijazah yang tak bisa ditukar dengan uang. Indonesia memiliki keunggulan bonus demografi karena komposisi penduduknya didominasi usia muda. Sehingga mestinya masa depan Indonesia terang benderang karena banyak cahaya bersinar," tutur Gobel.

Sukses atau gagal, menurut Gobel adalah pilihan bagi para sarjana. "Tentu tidak boleh gagal. Jadi harus sukses. Para

sarjana baru harus mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Dengan iptek dan imtak (iman dan takwa), melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah serta melalui doa, kegigihan, dan keyakinan yang diserap dari kehidupan sehari-hari. Itu pengalaman saya saat diberi tantangan oleh ayah saya," terang Gobel kepada para sarjana.

Di sisi lain, sebagai sarjana dari lembaga pendidikan Islam, ujar Gobel, para lulusan Unma merupakan aset tersendiri dalam ekonomi halal. "Potensi pasar ekonomi halal sangat besar. Manfaatkan itu. Jadilah produsen ekonomi halal, jangan menjadi konsumen," katanya.

Seperti terungkap dalam forum World Halal Summit akhir tahun 2021 lalu, potensi pasar ekonomi halal dunia mencapai 7 triliun dollar AS. "Hal inilah yang harus dimanfaatkan Indonesia," tegas politisi dapil Gorontalo itu.

Diketahui, Universitas Mathla'ul Anwar merupakan bagian dari organisasi keagamaan Mathla'ul Anwar (MA) yang lahir di Menes, Pandeglang, Banten. Organisasi tersebut berawal sebagai lembaga pendidikan modern yang berdiri pada 1916. Setelah itu berkembang menjadi organisasi keagamaan yang memiliki cabang di seluruh Indonesia.

Kelahiran MA merupakan bagian dari rangkaian kebangkitan gerakan keagamaan di awal abad ke-20 seperti Muhammadiyah (1912), NU (1926), Persis (1923), maupun Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam (1905). ■ es

Wakil Ketua DPR RI
Rachmat Gobel.
Foto: Azka/nvl



Gus Muhaimin Minta Pemerintah Lanjutkan Intervensi Harga Minyak Goreng



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar saat menggelar sidak harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Gamalama, Kota Ternate. Foto: ISI/nvl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta intervensi harga minyak goreng oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk dilanjutkan. Sebelumnya kebijakan intervensi harga minyak Rp14 ribu per liter berlaku hanya 6 bulan.

“Intervensi harga dalam 6 bulan ini lanjutkan saja. Tapi, kalau dirasa sudah stabil, ya sudah lepas lagi. Nanti kalau *enggak* stabil, intervensi lagi. Kita dorong untuk lanjut (intervensi harga),” ujar Gus Muhaimin usai menggelar sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Gamalama,

Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sabtu (29/1).

Ia mengatakan intervensi harga minyak goreng sangat membantu masyarakat. Menurutnya peran pemerintah dibutuhkan saat ini untuk menyeimbangkan harga bahan pokok. “Karena itu, lanjutkan intervensi harga minyak dan gunakan kewenangan pemerintah agar membantu masyarakat tidak menjadi kesulitan karena harga yang tinggi. Semua langkah pemerintah dalam menyangkut stabilitas harga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat supaya tidak mengalami kesulitan,” ucap Gus Muhaimin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga memaklumi pedagang yang masih menjual minyak

goreng di atas Rp14 ribu per liter. Dia mengingatkan pedagang tidak menaikkan harga jual ketika harga beli dari produsen sudah turun. “Ya itu karena faktor dia (pedagang) belanja untuk dijual itu harganya masih tinggi, tapi nanti pada saat tertentu tidak boleh menaikkan harga,” ujar Gus Muhaimin.

Selain mengecek langsung harga minyak goreng, ia juga menghampiri beberapa pedagang lain untuk menanyakan harga sayur, cabai, bawang putih, hingga sagu. Dari sidak itu, dia mengatakan harga-harga bahan pokok masih relatif stabil. “Hasil kita lakukan sidak ini relatif harga-harga stabil. Tapi ada juga yang menurun harganya. Secara umum stabil,” tutup legislator dapil Jawa Timur VIII itu. ■sf

Sambangi LPP TVRI Yogyakarta, Komisi I Jaring Masukan RUU Penyiaran

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran saat ini telah masuk dalam daftar Prolegnas, sebagai RUU Prioritas Tahun 2022 sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Desember 2021 menjadi usul inisiatif Komisi I DPR RI. Untuk itu, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan mendapatkan data, informasi, dan masukan terkait RUU tentang Penyiaran, yang akan digunakan sebagai bahan acuan dan kajian Panja Komisi I DPR RI dalam perumusan RUU Penyiaran.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan jajaran LPP TVRI Yogyakarta, di Yogyakarta, Jumat (28/1). Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di antaranya juga merevisi beberapa pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Beberapa pasal penting yang termuat dalam UU Cipta Kerja yaitu ditetapkannya *Analog Switch Off* (ASO) pada tahun 2022, model migrasi, dan penyelenggara multiplexing di setiap wilayah siar. Meskipun demikian, RUU tentang Penyiaran tetap sangat penting untuk dibahas, salah satunya adalah penyiaran multiplatform atau penyiaran yang berbasis internet saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya

Wakil Ketua
Komisi I DPR RI
Abdul Haris Almasyhari.
Foto: Andri/mvl



UU Penyiaran, pengaturan dan penyelenggaraan penyiaran diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini.

“Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengandung kelemahan. Salah satunya adalah *multiplatform* atau penyiaran yang berbasis internet, kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kurang optimal dan strategis terhadap tayangan di media sosial,” jelas Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, beragam masukan yang didapat dari kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini nantinya bisa menjadi masukan evaluasi dan bahan untuk penyusunan RUU Penyiaran. Revisi UU Penyiaran ini tentunya untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, memberikan tontonan yang baik kepada masyarakat, pengaturan industri penyiaran serta mengakomodir perkembangan teknologi penyiaran.

Beberapa lembaga yang hadir untuk menyampaikan masukan penyusunan

”

PADA KENYATAANNYA, UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENSIARAN MASIH MENGANDUNG KELEMAHAN. SALAH SATUNYA ADALAH MULTIPLATFORM ATAU PENSIARAN YANG BERBASIS INTERNET, KEWENANGAN KOMISI PENSIARAN INDONESIA (KPI) YANG KURANG OPTIMAL DAN STRATEGIS TERHADAP TAYANGAN DI MEDIA SOSIAL

RUU Penyiaran dalam agenda ini di antaranya Kepala Stasiun LPP TVRI Yogyakarta, Ketua KPID Yogyakarta, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas I, dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Lokal. ■ man/sf

Komisi I Serap Aspirasi RUU Penyiaran di Sumatera Barat



Foto bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI di Kantor TVRI Padang. Foto: Oji/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Barat (Sumbar), Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Padang, Ketua KPID Sumbar dan Ketua LPS Sumbar dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran dengan tema ‘Tantangan Penyiaran *Multiplatform* di Indonesia’.

“Perlu diketahui bahwa RUU tentang Penyiaran saat ini telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sebagai RUU Prioritas Tahun 2022 sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Desember 2021 menjadi usul inisiatif Komisi I DPR RI,” ungkap Sturman dalam sambutannya di Kantor TVRI Padang, Sumbar, Jumat (28/1).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dan Yogyakarta dengan tujuan mendapatkan data, informasi, dan masukan terkait RUU Penyiaran, yang akan digunakan sebagai bahan

acuan dan kajian Panja Komisi I DPR RI dalam perumusan RUU Penyiaran.

Sturman menjelaskan beberapa pasal penting yang termuat dalam UU Cipta Kerja yaitu ditetapkannya *Analog Switch Off (ASO)* pada tahun 2022, model migrasi, dan penyelenggara *multiplatform* di setiap wilayah siar. Meskipun demikian, RUU Penyiaran tetap sangat penting untuk dibahas, salah satunya adalah penyiaran *multiplatform* atau penyiaran yang berbasis internet saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, tema kunker ini fokus pada ‘Tantangan Penyelenggaraan Penyiaran *Multiplatform* di Indonesia’.” Kami juga mendorong TVRI Sumbar mempersiapkan diri secara serius menyongsong perubahan siaran analog ke digital, baik dari sisi peralatan (teknologi) maupun sumber daya manusianya,” tandas Anggota Baleg DPR RI ini.

Direktur Teknik LPP TVRI Sumbar Supriyono memaparkan bahwa pihaknya terus berusaha mengatasi beberapa wilayah yang belum terjangkau (*blank spot*) oleh siaran TVRI Sumbar bekerja sama dengan Kominfo

antara lain memasang beberapa unit transmisi digital dengan kekuatan rendah dan dioperasikan melalui *remote*.

“Sedangkan dari sisi sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di TVRI kebanyakan adalah pegawai Kominfo yang dititipkan di TVRI. Kami mohon agar masalah kepegawaian ini bisa segera diselesaikan sehingga kami bisa berbenah lebih profesional lagi,” imbuh Supriyono.

Selain itu, ia juga mempertanyakan (mengusulkan) apakah TVRI dimungkinkan untuk memiliki BLU (Badan Layanan Umum) melalui revisi UU Penyiaran, sehingga ke depan manajemen TVRI bisa lebih berkembang dan bisa mandiri secara keuangan.

Kunjungan Kerja diikuti oleh Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Christina Aryani, Yan Permenas Mandenas, Rachel Maryam Sayidina, Muhammad Farhan, Syaiful Bahri Anshori, Bachrudin Nasori, Darizal Basir, Ahmad Syaikhu, Almuzammil Yusuf, Alimin Abdullah, Slamet Ariyadi, dan Muhammad Iqbal. ■ oji/sf

Komisi II: UU Nomor 25 Tahun 1956 Perlu Penyesuaian



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung berfoto bersama usai memimpin Panja Pembahasan RUU tentang Provinsi di Kalimantan Selatan. Foto: Ria/nvl

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, saat ini Komisi II DPR RI sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, mengingat UU dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, lanjut Doli, terkait keberadaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur melihat dasar hukum pembentukan UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan

Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi.

“Selain itu, kondisi ini juga telah mempertimbangkan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten/kota, dimana hal ini biasanya diatur di dalam satu undang-undang tersendiri, mengingat daerah memiliki kebutuhan, karakter dan potensinya masing-masing,” jelas Doli saat memimpin Panja Pembahasan RUU tentang Provinsi dalam rangka mendapatkan masukan tentang RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, di Kantor Gubernur Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (26/1).

Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, perlu adanya pengaturan yang bersifat penyesuaian

terhadap Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang sejalan dan sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), serta dengan mengacu kepada ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Selain untuk mengganti alas hukum terhadap ketiga Provinsi ini, ada beberapa isu penting yang akan diatur di dalam RUU ini di antaranya adalah terkait mengenai posisi, batas, pembagian wilayah; karakteristik provinsi; pola dan arah pembangunan; prioritas pembangunan; perencanaan; personel, aset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendanaan; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; dan partisipasi masyarakat,” jelas Doli. ■ rmm/sf

Komisi II: Setiap Provinsi Perlu Miliki UU Provinsi Sendiri



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim saat bertukar cenderamata dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Foto: Arief/mvl

Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI memandang perlu dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (UU RIS). Oleh karena itu, Komisi II DPR RI menilai perlu bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri sebagaimana amanat dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Rabu (26/1). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan undang-undang provinsi yang dibuat di zaman RIS secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan konsep otonomi daerah saat ini,” tegas Luqman. Ia menerangkan masih ada puluhan provinsi yang peraturan undang-undangnya masih satu, bergabung dengan beberapa provinsi dan masih menggunakan alas hukum yang lama yaitu RIS yang sekarang sudah dicabut.

“Kalau ada urusan internasional ini akan menjadi problem kalau tidak kita selesaikan. Penataan administrasi ketatanegaraan menjadi penting bagi kita apabila memang kita ingin kedaulatan negara kita ini betul-betul utuh terutama dalam konteks

internasional,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Di tempat yang sama, Gubernur Sulut Olly Dondokambey sangat mengapresiasi atas pembahasan RUU Provinsi khususnya Provinsi Sulut. Pemerintah Provinsi Sulut sangat bersyukur adanya pembahasan ini. Karena sampai saat ini Provinsi Sulut memakai undang-undang yang masih satu dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami bersyukur kalau sudah ada landasan undang-undang yang baru dan kami sangat berterima kasih, karena dasar hukum sudah lebih jelas, ini sangat penting mengingat Undang-Undang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah kedaluwarsa, kita juga tidak punya masalah tapal batas dengan Gorontalo, karena Gorontalo sudah punya undang-undang sendiri,” kata Gubernur Olly lebih lanjut. ■ afr/sf

Komisi III Minta Polda dan Kejati Awasi Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kalbar

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyoroti implementasi *restorative justice* sebagai jalan untuk penyelesaian perkara tindak pidana yang diharapkan dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaat, sehingga dapat menghemat anggaran negara. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap diawasi oleh jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat agar tidak timbul penyimpangan.

“Kami berharap berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Kejaksaan Agung dan Peraturan Pak Kapolri Nomor 8 Tahun

2021 bahwa (tindak pidana) perkara-perkara ringan bisa ditangani dengan *restorative justice*,” jelas Pangeran saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Kalbar di Ruang Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar, Pontianak, Jumat (28/1).

“Jadi bisa membantu masyarakat, bisa memberi harapan rasa keadilan masyarakat dan bisa juga menghemat uang negara. Tidak menggunakan uang ke penyelidikan-penyelidikan sampai dengan nanti masuk penjara juga biaya lagi. Ini memang rawan penyimpangan oleh oknum, tapi kami minta kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati untuk betul-betul bisa mengawasi (pelaksanaan *restorative justice*),” sambung Pangeran.

Di sisi lain, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi jajaran Polda dan Kejati Kalbar terkait penanganan Covid-19 dan pengawalan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kalbar. Hal ini dibuktikan dengan data terbaru vaksinasi yang dipaparkan oleh Kapolda dan Kajati Kalbar.

“Kami melihat terkait dengan penanganan Covid-19 di wilayah Kalimantan Barat sangat menggembirakan. Apa yang dilaporkan Pak Kajati bahwa penanganan Covid-19 kemajuannya di sini sudah mencapai 75,12 persen. Ini cukup bagus dan kami berharap ini segera bisa ditingkatkan,” dorong Pangeran. ■ ais/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalbar dan Kajati Kalbar beserta jajaran. Foto: Aisyah/hvl



PN Jakpus Bisa Menjadi Percontohan Bagi Pengadilan yang ada di Indonesia

Komisi III DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini Anggota Komisi III meninjau berbagai fasilitas di PN Jakpus, dari ruang sidang sampai dengan *media center*. Adies menilai PN Jakpus bisa menjadi

percontohan bagi pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh Indonesia dari segi fasilitas dan juga pelayanan, namun meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu perbaikan.

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini merupakan pengadilan yang sudah sangat lengkap fasilitas-fasilitasnya, ada beberapa hal-hal yang perlu perbaikan tapi sudah bisa dijadikan *role model*, contoh bagi pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia baik dalam pelayanan maupun infrastruktur, kami lihat ruang sidangnya sangat

Wakil Ketua Komisi III
DPR RI Adies Kadir.
Foto: Eko/nvl

mumpuni,” papar Adies usai peninjauan di PN Jakpus, Kemayoran, Jakarta, Senin (31/1).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPR RI juga menyerap masukan dan aspirasi dari para hakim untuk materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dan RUU Jabatan Hakim. Politisi Partai Golkar ini juga mengungkapkan, Komisi III akan melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan RUU yang dibahas serta berbagai kebutuhan dan fasilitas bagi hakim.

“Kami juga dapat banyak masukan dalam rangka untuk menjalankan tugas konstitusi kita menyusun RUU Hukum Acara Perdata dan juga RUU Jabatan Hakim yang akan segera kita garap di DPR RI. Jadi banyak masukan yang kita terima dalam RUU Jabatan Hakim terkait fasilitas keamanan bagi para hakim harus diperhatikan, tunjangan kesehatan, tempat tinggal, serta fasilitas bagi para hakim itu akan dimasukkan dalam RUU Jabatan Hakim,” jelas legislator dapil Jawa Timur I tersebut.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Surachmat menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga atas kunjungan Komisi III ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia mengharapkan RUU Jabatan Hakim dan Hukum Acara Perdata bisa terealisasi. Menurutnya dengan kunjungan Komisi III bisa meringankan kompleksitas tugas yang diemban para hakim.

“Kami berharap RUU ini bisa terlaksana, begitu berat beban tugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini karena menangani beberapa pengadilan khusus ada niaga, ada hubungan industrial, ada tipikor, HAM juga dan undang-undang juga mengatur Pasal 86 KUHAP apabila pelanggar yang ada di luar negeri bagi orang Indonesia maka persidangannya dilakukan di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di pengadilan lain,” untkapnya. ■ eko/sf



Komisi IV Dorong Pemecahan Masalah Sampah di Hutan Mangrove Bali



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Komisi IV DPR RI meninjau hutan mangrove di Bali. Foto: Agung/nvl

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik guna melihat perawatan hutan mangrove di Taman Hutan Raya, Denpasar, Bali. Sebagaimana diketahui, lokasi hutan mangrove tersebut akan menjadi lokasi yang akan ditunjukkan Presiden RI Joko Widodo ke para pemimpin negara-negara G-20 sebagai bukti keberhasilan Indonesia melakukan rehabilitasi mangrove.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebutkan kunjungan kali ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi mengenai banyaknya sampah rumah tangga dan sampah plastik yang mencemari hutan

itu. "Kami tidak ingin permasalahan sampah menjadi noda yang tidak baik dalam penyelenggaraan acara Presidensi G20," ujar Sudin di Denpasar, Bali, Kamis (27/1).

Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Bali mencari solusi penanganan sampah di sekitar Taman Hutan Raya Bali.

Sudin juga berpesan agar pengelolaan sampah ke depannya harus dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut,

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah yang baik akan memberikan dampak ekonomi sirkular yang besar sebagai contoh pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik yang di butuhkan para petani, pemanfaatan sampah plastik untuk diolah kembali dan kerajinan juga membuka lapangan pekerjaan di Bali.

Bahkan Komisi IV DPR RI mencatat beberapa aplikasi *start-up* untuk mengendalikan sampah sudah banyak tumbuh di Pulau Dewata. "Artinya keberhasilan pengelolaan sampah di Bali akan memberikan manfaat yang besar untuk mendukung pariwisata bali dan menumbuhkan ekonomi sirkular di Bali," pungkas Sudin. ■ ah/sf



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau pabrik PT Garam. Foto: Sofyan/nvl

Komisi IV Sidak Kawasan Hutan yang Dialihfungsikan Menjadi Perkebunan Sawit

Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan hutan yang dialihfungsikan secara ilegal oleh masyarakat dan beberapa perusahaan swasta besar menjadi kebun kelapa sawit, di Pekanbaru, Riau, Jumat (28/1).

“Kami secara spesifik meninjau kawasan hutan yang dialihfungsikan secara ilegal oleh swasta menjadi perkebunan kelapa sawit. Diketahui totalnya sekitar 1,8 juta hektar, dan kebun sawit yang kami datangi kali ini yang dikelola secara ilegal selama 25 tahun oleh PT Guna Dodos seluas 884 hektare,” ujar Dedi.

Dari kegiatan tersebut, lanjut Dedi, negara jelas sangat dirugikan. Pendapatan yang seharusnya masuk



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin sidak ke kawasan hutan di Pekanbaru. Foto: Ayu/nvl

ke kas negara dari pajak kayu hasil pembukaan lahan hutan yang ditebang dan dijual. Serta pajak negara dari hasil pengolahan dan produksi sawit. “Belum lagi kerusakan hutan dan lingkungan akibat penebangan pohon untuk membuka

lahan sawit. Belum lagi polusi akibat kebakaran hutan akibat pembukaan lahan,” tambah Dedy. Ke depan, Komisi IV DPR RI akan memanggil dan membahas temuan sidak ini kepada Gubernur Riau, Bupati dan Wali Kota se-Riau. ■ ayu/sf

Perlu Kajian Mendalam Terkait Klasifikasi Garam

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar menegaskan, perlu pengkajian lebih dalam mengenai klasifikasi garam konsumsi dan garam industri, seperti untuk industri penyamakan kulit dan aneka pangan, sehingga peran petani garam dapat masuk dalam pangsa pasar industri juga tidak bergantung pada garam impor. Menurutnya garam untuk industri penyamakan tapi tidak harus kualitas garam impor industri, sehingga

bisa menggunakan garam rakyat bisa. Sehingga dengan adanya klasifikasi itu tidak menjadi dalih untuk impor garam.

“Harus dijelaskan, pabrik jenis ini untuk produksi garam industri, kemudian garam konsumsi untuk masyarakat banyak itu mana yang bisa digunakan untuk pemakaian industri. Nanti akan dilihat neraca garamnya, berapa garam nasional yang mampu kita produksi, berapa yang harus kita datangkan dari luar (impor), dan untuk kebutuhan apa kita datangkan dari

luar,” jelas Mindo saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Pabrik Garam PT Garam, di Segoromadu, Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/01).

Dalam kunjungan ini, Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari petani dan petambak garam, bahwa garam konsumsi dari nasional sudah mencukupi. Namun yang menjadi persoalan adalah garam impor yang seharusnya untuk kebutuhan industri, justru rembes ke pasar konsumsi. Politisi PDI-Perjuangan tersebut menilai, dengan harga relatif lebih murah dibanding garam konsumsi nasional, rembesan garam impor industri yang seharusnya tidak terjadi itu dapat merusak harga pasar. ■ sf



Pembangunan Tol Semarang - Demak Harus Sesuai Standar

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol Semarang - Demak agar sesuai standar dan kualitas konstruksi jalan.

“Selain itu, BPJT wajib memenuhi SPM (Syarat Pelayanan Minimal) yang meliputi kondisi jalan tol, prasana dan keamanan, serta prasana pendukung jalan tol,” kata Ridwan Bae saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Ruas Tol Semarang - Demak, di Jawa Tengah, Kamis (27/1).

Ridwan Bae mengatakan, pengawasan terhadap standar ini diperlukan mengingat telah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. “Hadirnya UU Jalan memberi penyempurnaan terhadap peraturan tentang jalan tol lebih berpihak kepada masyarakat pengguna jalan, tanpa menurunkan minat investasi yang sedang berkembang,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap kepada *stakeholder*, terkait permasalahan lahan segera diselesaikan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tanah musnah. “Kami berharap semua (pihak) yang terkait, terutama tim yang dibentuk mengenai permasalahan lahan agar diselesaikan,” tegas Ridwan Bae.

“Begitu juga dengan konstruksi jalan agar dijaga mutunya, dijaga pelaksanaannya, tidak boleh ada kelemahan, sehingga dapat bermanfaat

bagi masyarakat. Kita juga berharap agar *stakeholder* yang terkait dengan pengurusan Perpres Tanah Musnah segera keluar, sehingga tidak menghambat pelaksanaan jalan tol itu sendiri,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara itu.

Diketahui, pengerjaan Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 1 Kaligawe - Sayung yang memiliki panjang 10,64 kilometer merupakan porsi pemerintah. Sementara itu, untuk seksi 2 Sayung - Demak sepanjang 16,31 kilometer menjadi porsi BUJT PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PPSD).

■ opi/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI. Foto: Gerald/nvl

Dinilai Janggal, Komisi V Minta Perjanjian Kerja Sama SPAM Bandar Lampung Dievaluasi

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui PDAM Way Rilau sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha.

Komisi V Dorong Pemerintah Selesaikan Pembangunan Bendungan Pamukkulu Tepat Waktu



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau maket Bendungan Pamukkulu. Foto: lcha/nvi

Proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu, yang terletak di Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ini terus dikawal oleh Komisi V DPR RI agar dapat selesai tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan,

yaitu tahun 2024 atau lebih cepat di tahun 2023. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan, proses pembangunan Bendungan Pamukkulu saat ini sudah mencapai lebih dari 20 persen. .

“Progres pembangunan Bendungan Pamukkulu ini sudah mencapai angka 20 persen lebih. Memang

betul, tadinya kontrak perencanaan pembangunan bendungan ini berakhir di tahun 2021, namun karena ada permasalahan sosial, yakni terkait pembebasan lahan, maka pembangunan bendungan ini sempat terhambat. Kemudian saat ini, kontrak pembangunan Bendungan Pamukkulu telah mengalami perpanjangan hingga tahun 2024,” ungkap Andi Iwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/1).

Diketahui, Bendungan Pamukkulu memiliki luas 640 hektare (ha) dan terletak di bagian hulu Sungai Pappa di Desa Kale Ko'Mara, Kabupaten Takalar, Sulsel,

Andi Iwan memaparkan bahwa terkait masalah pembebasan lahan sedang terus berproses, dan diharapkan pada tahun 2023 atau 2024 masalah tersebut sudah selesai. Lebih lanjut, Andi Iwan terus mendukung pemerintah, dalam hal ini khususnya kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, agar bisa menyelesaikan pengerjaan Bendungan Pamukkulu ini secara cepat. ■ ica/sf

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, ada kejanggalan dalam perjanjian kerja sama bisnis dalam proyek tersebut sehingga menyebabkan PDAM Way Rilau terhutang hingga Rp21 miliar. Ia meminta agar segera dilakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama yang dianggap merugikan pemerintah itu.

“Menurut kami ada kejanggalan bisnis yang harus diperbaiki ke depan. Ada nilai kerugian di PDAM,” kata Roberth Rouw saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau reservoir PDAM Way Rilau di Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (27/1).

Jika dilaksanakan secara baik dan profesional, sambung Roberth, PDAM Way Rilau tak seharusnya mengalami kerugian. Ia berpandangan, dalam pembayaran dari pemerintah ke pihak ketiga (badan usaha), seharusnya dilakukan berjenjang dengan tingkat waktu tertentu.

Politisi Partai NasDem ini menegaskan, proses kerja sama antara PDAM Way Rilau dengan pihak ketiga (PT Adhya Tirta Lampung), harus segera diluruskan. Ia meminta segera mengambil kebijakan terbaik sehingga air sebagai kebutuhan utama masyarakat dapat tersalurkan. ■ es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau reservoir PDAM Way Rilau. Foto: Erman/nvi

Komisi VI: PTPN Wajib Kembangkan Hilirisasi Produk



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung (kiri). Foto: Anne/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi VI ke PT Perkebunan Nusantara II terkait kapasitas produksi sawit sebagai bahan produksi minyak goreng. Dalam pertemuan tersebut, Martin mendorong PT Perkebunan Nusantara Group agar mengembangkan produk hilirisasi. Menurutnya, sebagai salah satu anak

PTPN Belum Mampu Stabilkan Kebutuhan Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menguasai 600 ribu ton produksi minyak goreng, dengan hanya satu pabrik produksi yang berada di Sumatera Utara, tidak cukup mampu menjadi stabilisator untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng. Herman menilai, dari penguasaan lahan, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dan hasil minyak goreng tidak cukup untuk mengatasi situasi harga minyak goreng yang meroket saat ini. Penguasaan minyak goreng jauh lebih besar dikuasai swasta.

“Mohon maaf saya tidak mendiskreditkan swasta, akan tetapi ini merupakan persoalan hajat hidup orang banyak, yang dimana semua kebijakan yang di kembalikan lagi ke

negara. Dengan demikian kalau pun ada penugasan harus dikaji terlebih dahulu, jangan sampai menjadi beban,” kata Herman usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direktur SDM Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), di Pekanbaru, Riau, Kamis (27/1).

Menurut politisi Partai Demokrat

itu, jika penugasan dari negara dipaksakan kepada perusahaan BUMN, nantinya akan menjadi beban dan tanggung jawab besar. “Jika korporasi menjadi rugi, tidak akan ada dividen. Sebaliknya jika utang semakin berat, imbasnya terhadap pengurangan tenaga kerja, kemudian akan mengurangi kemampuan BUMN untuk menyerap tenaga kerja. Untuk itu, ke depannya jika ada penugasan diharapkan adanya kompensasi sesuai dengan besaran penugasan tersebut,” usul Herman.

Herman meminta jika ada lagi penugasan kepada perusahaan BUMN



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau PTPN 5 di Pekanbaru, Riau. Foto: Runi/nvl

usaha BUMN di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit, hilirisasi PTPN nantinya diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus stabilisasi harga.

“Kami apresiasi, namun kami juga mendorong PTPN persero untuk bisa hilirisasi produk-produknya,” ungkap Martin usai pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Grup Abdul Ghani beserta direksi PTPN, di Deli Serdang, Sumut, Kamis (27/1).

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, adanya produk-produk hilirisasi mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Lebih lanjut, hilirisasi produk diharapkan dapat mendukung stabilisasi harga bahan pokok di masyarakat. ■ ann/sf

yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, pemerintah harus bisa mengukur kemampuan perusahaan, agar tidak membebani seluruh pihak.

“Apapun yang terjadi dunia internasional, tentu ini bisa diusahakan BUMN. PTPN sebagai pelaksana yang ditugaskan oleh negara untuk bisa menguasai sektor hajat hidup orang banyak ini harus terus dibesarkan, agar mampu menyeimbangkan situasi tekanan harga akibat persaingan pasar. Menurut saya kebijakan negara yang harus diperbaiki, besarkan kawasan, produksi diluaskan, diimbangkan dari yang sekarang hanya menguasai 6 persen. Ke depan diharapkan bisa menguasai 50 persen,” saran legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

“Agar suatu saat komoditas ini menjadi langka di dunia internasional dan kita bisa melakukan stabilisasi harga untuk masyarakat yang lebih terjangkau. Tentu dengan memperluas pangsa pasar dan produksi akan menjadikan pondasi yang kuat bagi negara untuk memakmurkan rakyat, karena akan ada pendapatan lebih besar,” tutup Herman. ■ rni/sf

Harga Melambung Tinggi, Komisi VI Dorong Perbaikan Tata Niaga Industri Minyak Goreng

Tingginya harga minyak goreng yang tak terkendali beberapa waktu lalu memukul perekonomian masyarakat khususnya pedagang kecil menengah ke bawah yang bergantung pada industri ini. Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta adanya langkah percepatan untuk menurunkan kembali harga minyak goreng, salah satunya dengan pengelolaan sistem tata niaga penjualan minyak goreng.

Untuk itu, menurut Rieke perlu adanya dukungan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) group sebagai salah satu BUMN yang bergerak di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang dimana menjadi salah satu produsen bahan baku minyak goreng. “Terkait harga minyak satu harga ini merupakan langkah percepatan, pada saat pertemuan di Komisi VI, kami bersama sedang berupaya dengan mitra kementerian sebagai mitra kita,” tutur Rieke

saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama direksi PTPN VI di Jambi, Kamis (27/1).

Sambung politisi PDI-Perjuangan itu. Rieke menilai perlu adanya tindakan yang lebih terukur untuk ini mengetahui kondisi kapasitas produksi dari PTPN dalam penyediaan *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng.

“Karena diakui pemerintah belum ada integrasi yang cukup baik antara industri hulu dari CPO dan industri minyak goreng. Sehingga bisa terjadi kolaborasi, termasuk penentuan dari harga CPO yang bisa lebih memberikan *support* dan optimisme dari industri nasional kita,” ujar legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.

Sebelumnya, harga minyak kemasan menembus angka Rp38 ribu/liter.

Untuk menekan harga minyak goreng yang terlampau tinggi, pemerintah telah melakukan operasi pasar minyak goreng murah di beberapa daerah. ■

pdt/sf

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Foto: Prima/rvl



Komisi VII Apresiasi Capaian Sukses Produk Kutus-Kutus Tembus Pasar Internasional



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat meninjau Pabrik Minyak Kutus-Kutus. Foto: Devi/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi capaian sukses produk herbal Kutus-Kutus hasil produksi PT Tamba Waras yang mampu bersaing dengan produk herbal sejenis hingga berhasil menembus pasar domestik, bahkan pasar internasional.

“Kutus-Kutus adalah produk herbal yang memiliki banyak khasiat. Ini sebuah fenomena luar biasa, dimana Kutus-Kutus mampu menembus pasar seluruh Indonesia dengan jumlah *reseller*-nya lebih dari 5000 bahkan sudah ke mancanegara. Kami melihat ini sesuatu yang layak menjadi perhatian kita untuk bisa memberikan *support* dan dukungan kepada PT Tamba Waras

Pertamina Dinilai Telah Matang Siapkan Kebutuhan BBM Saat Perhelatan G20

PT Pertamina dinilai telah melakukan persiapan dengan matang terhadap kebutuhan BBM saat perhelatan G20 digelar pada November 2022 mendatang. Dukungan atas lonjakan kebutuhan

bahan bakar minyak (BBM) pun sudah disiapkan dari wilayah Jawa Timur.

Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Husen/nvl

selaku produsen Kutus-Kutus,” kata Sugeng saat memimpin Komisi VII DPR RI meninjau Pabrik Minyak Kutus-Kutus di Gianyar, Bali, Kamis (27/1).

Sugeng mengungkapkan, semua bahan baku yang digunakan dalam produk Kutus-Kutus adalah jenis herbal. Bahan baku herbal yang digunakan juga dibeli secara langsung dari masyarakat dengan kualitas yang terkontrol. “Pada intinya mereka ingin pemerintah atau negara hadir menertibkan bagi yang mereka melanggar aturan yang berlaku, sedangkan bagi yang tidak melanggar dan patuh pada peraturan yang ada biarkanlah berkembang,” tuturnya.

Sugeng berharap, produk-produk seperti ini yang dimulai dari kearifan lokal dan ada sentuhan-sentuhan emosionalnya bisa terus berkembang dan terbangun kreativitasnya. “Silakan gali kreativitas-kreativitas yang berdimensi kearifan lokal semacam itu, toh nanti ada standar-standarnya yang secara kasat mata dan di rasa itu tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. ■ dep/sf

Sanggaran, Denpasar, Bali, Kamis (27/1). “Jadi secara keseluruhan kami melihat Pertamina sudah membuat perencanaan yang cukup matang. Tinggal sekarang bagaimana pelaksanaan di lapangan. Mudah-mudahan tidak ada masalah,” ujar Eddy.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, kebutuhan BBM saat perhelatan G20 nanti, tidak hanya untuk kendaraan dan pembangkit, tapi juga avtur, karena akan ada peningkatan frekuensi penerbangan yang sangat tinggi saat G20 dihelat. Bahkan, kebutuhan BBM pada perhelatan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret mendatang, juga sudah disiapkan. ■ mh/sf

Komisi VII Pantau Pengelolaan PLTS Pasca Hibah KESDM ke Pemkab Karangasem

Komisi VII DPR RI memantau dan menyerap masukan pengelolaan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) Kubu, pasca hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) ke Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menjelaskan pembangunan PLTS tersebut menggunakan dana APBN sebesar Rp26,478 miliar melalui program Kementerian ESDM dan dibangun oleh kontraktor PT Surya Energi Indotama (PT SEI).

“Karena itu, Komisi VII hadir ke sini dalam rangka melihat secara langsung kegiatan operasi PLTS 1 MWp On Grid Karangasem pasca penyerahan aset ke Pemda Karangasem pada tahun 2017 dan mendapatkan penjelasan menyangkut kondisi pembangkit saat ini dan kendala apa saja yang dihadapi saat ini,” ujar Dony saat memberikan kata sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII

DPR RI di PLTS Kubu, Karangasem, Bali, Kamis (27/1).

Menurut Dony, berdasarkan data dari IESR (*Institute for Essential Services Reform*) tahun 2021, Bali memiliki potensi PLTS yang besar, hingga mencapai 26,4 GWp. “Tidak salah kiranya jika PLTS merupakan energi terbarukan yang tepat untuk dikembangkan di Bali,” ujarnya.

Pembangunan PLTS ini, tambah Dony, juga selaras dengan visi Provinsi Bali, yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, yang berarti Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya. Sehingga, setiap pembangunan yang ada di Bali harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Untuk menjamin keberlangsungan operasionalnya, saat ini, PLTS Kubu Karangasem, telah dihibahkan oleh Kementerian ESDM ke Pemkab Karangasem sejak tahun 2017. Dony berharap pasca hibah, pengelolaan PLTS 1 MWp On Grid di Desa Kubu Karangasem dapat dilakukan badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah (PERUSDA). ■ rdn/sf

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Dony Maryadi Oekon.
Foto: Ridwan/nvl



Komisi IX DPR RI yakin Provinsi Bali siap menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan kegiatan internasional seperti Presidensi G20 yang akan dilaksanakan pada November 2022. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Pemprov Bali bersama *stakeholders* harus memastikan terselenggaranya acara-acara besar di Bali dengan tetap menaati protokol kesehatan (prokes).

“Kami sudah mendengarkan penjelasan dari Wakil Gubernur Bali

Komisi IX Yakin Bali Siap Jadi Tuan Rumah G20

maupun dari berbagai *stakeholder*, termasuk otoritas bandara dan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Denpasar. Oleh karena itu, kami cukup yakin (Bali siap menjadi tuan rumah G20). Apalagi sudah ada simulasi sebanyak 19 kali di bandara, bagaimana

menghadapi pelaku perjalanan dari luar negeri, termasuk delegasi dari forum-forum besar seperti G20,” jelas Charles saat memimpin Kunspek Komisi IX DPR RI ke Denpasar, Bali, Kamis (27/1).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan, kehadiran Komisi IX DPR RI secara tidak langsung merupakan bentuk dukungan kepada Provinsi Bali yang saat ini mengalami masa sulit. Pasalnya, pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan pada industri pariwisata di Bali.

“Sehingga Komisi IX datang ke Bali untuk mendengarkan berbagai aspirasi. Baik dari Pemprov Bali maupun dari IDI Bali dan PERSI Denpasar. Sehingga, kami bisa membantu provinsi Bali segera bangkit menghadapi Covid-19,” beber Charles. ■ hal/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemprov Bali. Foto: Hira/nvl

Komisi IX Pantau Penerapan Prokes Jelang G20 dan MotoGP 2022



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI meninjau Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Foto: Eko/nvl

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menghimpun informasi dan gambaran yang komprehensif tentang penerapan protokol kesehatan dan persiapan infrastruktur untuk Pertemuan G20 pada November

2022, serta persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022 pada Maret 2022.

“Kami ingin mendapatkan masukan tentang kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan protokol kesehatan dalam Presidensi G20 dan MotoGP Mandalika 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” papar Ansory saat memimpin pertemuan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja

terkait di Lombok, NTB, Kamis (27/1).

Komisi IX DPR RI juga menggali informasi terkait upaya Pemprov NTB dalam menekan penyebaran kasus Omicron di daerah setempat. Menurut Ansory, sebagai tuan rumah, Indonesia tidak hanya menyediakan sarana yang memadai, tapi juga harus didukung dengan kesiagaan layanan bidang kesehatan yang optimal. ■ eko/sf

Komisi X Pantau Penerapan PTM di Kabupaten Bandung

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memimpin Komisi X DPR RI untuk memantau secara langsung penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Disampaikan Bupati Bandung Dadang Suprayitna, pelaksanaan PTM sudah mencapai 50 persen dan dilaksanakan secara bergiliran. Sementara vaksinasi bagi peserta didik usia 6-11 tahun sudah mencapai 80,94 persen.

“Kami apresiasi karena sampai hari ini belum mendapatkan kabar ada klaster di sekolah. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi kabupaten bandung sebagai penyangga dari ibu kota provinsi,” kata Huda usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dengan Bupati Bandung beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/1).

Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI juga mengonfirmasi terkait pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bandung, apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah, skema gaji PPPK sepenuhnya akan ditanggung penuh oleh APBN, melalui tambahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Namun faktanya DAU Kabupaten Bandung tidak bertambah, sehingga Pemkab Bandung tidak berani mengusulkan formasi maksimal untuk guru PPPK di wilayahnya.

Huda mendapati informasi belum ada penambahan DAU Kabupaten Bandung. “Ini kelihatan kenapa bupati masih belum berani mengusulkan formasi maksimal untuk guru honorer menjadi pegawai PPPK, karena faktanya



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cenderamata dengan Bupati Bandung. Foto: Tari/nvl

DAU-nya tidak naik, padahal pemerintah pusat, Kemendikbudristek merasa DAU-nya sudah ditambahkan. Nah, ini akan menjadi PR bagi kami dan akan kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Kemendikbudristek,” komitmen politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kepada Bupati Bandung.

Dalam kesempatan itu Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali wacana kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Dadang menilai, penghapusan tenaga honorer akan berdampak pada pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Saat ini Pemkab Bandung memiliki 25.000

tenaga honorer, 20.000 di antaranya guru. “Jika rencana (penghapusan) ini diberlakukan, bagaimana nasib mereka dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat?” tanya Dadang.

Dadang juga menyampaikan pelaksanaan PTM di Kabupaten Bandung sudah dilakukan awal Januari lalu. “Alhamdulillah meskipun dilaksanakan secara bergiliran, pelaksanaan PTM sudah mencapai 50 persen. Insya Allah Februari nanti sudah 100 persen,” jelas Dadang seraya menambahkan, guna mendukung capaian tersebut, pihaknya terus meningkatkan persentase vaksinasi kepada peserta didik usia 6-11 tahun di wilayah Kabupaten Bandung. ■ mri/sf

Komisi X Tinjau Pelaksanaan PTM 100 Persen di Depok



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng P meninjau pelaksanaan PTM di SMPN 1 Depok. Foto: Rizki/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di SMP Negeri 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (28/1). Peninjauan ini guna melihat langsung pelaksanaan

kebijakan PTM 100 persen dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.

Komisi X DPR RI disambut hangat dan bahagia oleh peserta didik dengan tarian-tarian tradisional dan pertunjukan pencak silat yang diatraksikan dengan penuh semangat. Agustina menilai hal ini menandakan

peserta didik itu sangat bahagia dan antusias dengan pelaksanaan PTM 100 persen.

“Lihat semangatnya saat (peserta didik) menyambut kami, mereka sangat bahagia. Ini menandakan bahwa mereka antusias dengan pelaksanaan PTM ini, mungkin juga karena sudah merindukan teman-teman dan gurunya bertemu secara langsung atau mereka sudah jenuh dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang selama ini sudah dua tahun berjalan,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain memantau pelaksanaan PTM 100 persen, kata Agustina, Komisi X DPR juga ingin mengetahui informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik. Kemudian Komisi X DPR juga menyoroti mekanisme pembiayaan guru PPPK dan pemahaman serta capaian dari Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak. “Kami juga memantau pelaksanaan vaksinasi guru dan siswa serta capaian dari Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak,” kata Agustina. ■ qq/sf

Penerimaan PPPK, Desy Ratnasari Soroti Afirmasi kepada Penyandang Disabilitas

Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari menyoroti afirmasi kepada penyandang disabilitas dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, hal tersebut menjadi suatu perhatian penting. Untuk itu ia mempertanyakan apakah konteks disabilitas tersebut yang justru mencegah penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan di dalam menjadi PPPK.

Hal itu disampaikan Desy usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI

dengan jajaran Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam rangka peninjauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pembiayaan guru PPPK,



Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari. Foto: Hanum/nvl

Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (28/1).

“Ini menjadi suatu catatan penting dalam konteks pendidikan, pengangkatan PPPK, menjadi guru atau apapun para penyandang disabilitas berkewarganegaraan Republik Indonesia memiliki hak yang sama dan setara untuk bisa mengakses kehidupan mereka dan mendapatkan keadilan bagi mereka untuk bisa menjadi manusia yang mandiri dan sejahtera,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. ■ hnm/sf

BURT: Pelayanan dan Sarpas RSUD Kota Bogor Sudah Cukup Representatif

“Tentu program seperti ini harus di dorong, karena itu baik untuk kawan-kawan anggota yang selesai pada masa periode dan PAW. Sangat manusiawilah, jika diberikan tambahan fasilitas kesehatan selama 3 bulan. Nanti kami bisa berkoordinasi dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR agar setelah purna tugas bisa mendapat layanan kesehatan dengan waktu tertentu,” imbuh Agung.

Selain itu, politisi partai Demokrat ini juga mengapresiasi terhadap inovasi kinerja RSUD Kota Bogor ini.



Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso saat memimpin Kunker BURT DPR RI guna meninjau pelaksanaan program VVIP Jamkestama di RSUD Kota Bogor. Foto: Jaka/nvl

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso mengatakan, fasilitas pelayanan dan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor sudah cukup representatif untuk melayani kesehatan bagi sejumlah Anggota DPR di dapil tersebut maupun masyarakat umum. Namun, ia mengingatkan, agar program VVIP Jamkestama dari asuransi kesehatan Jasindo terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap RS, sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) di kota besar dan kecil sama.

“Saya lihat RSUD Kota Bogor ini sudah sangat bagus, sudah representatif. Cuma persoalannya, apakah RS ini sudah betul dan jelas terhadap SOP yang diberikan oleh

Jamkestama. Bagaimana nanti pelayanannya terhadap pemegang kartu Jamkestama VVIP ini. Karena ada masukan dan keluhan dari teman-teman Anggota Dewan. Nah, harapan kami itu, sehingga kalau SOP-nya sama, Insya Allah tidak ada lagi komplain dari para Anggota DPR dan keluarganya,” ujar Agung saat memimpin Tim Kunker BURT DPR meninjau pelaksanaan program VVIP Jamkestama di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (31/1).

Legislator dapil Jabar I ini juga mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh Jasindo terkait program asuransi jaminan pemeliharaan. Dimana, program ini akan memberikan kesempatan pembiayaan kesehatan selama 3 bulan setelah purna tugas atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sama seperti waktu masih aktif.

Pasalnya, mereka tidak memikirkan biaya untuk penanganan pasien yang kurang mampu, karena mereka tetap layani dengan pelayanan terbaik kepada pasien. Pasalnya untuk biaya pengobatan pasien, RSUD Kota Bogor mencarinya melalui program seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

“Hal seperti ini harus kami apresiasi. Kalau seluruh RS di Indonesia punya pola pikir seperti dr. Ilham Chaidir (Direktur RSUD Kota Bogor) bagus sekali. Artinya persoalan biaya itu menjadi persoalan ke nomor sekian, tidak diawal, tapi yang penting pasien ditangani dan disehatkan dulu, setelah sehat urusan RS mencari biayanya, ini luar biasa. Sangat patut di apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan RSUD Kota Bogor. Tentu ini bisa jadi percontohan untuk RSUD di daerah lain,” pungkas Agung. ■ jk/sf



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



**SAVE THE
DATE !**



144th IPU

**(Inter-Parliamentary Union)
Assembly & Related Meetings**

**Nusa Dua, Indonesia
20 - 24 Maret 2022**



@DPR_RI



DPR RI